



Al-Kahf: Contemporary Islamic Economics and Finance

Vol. xx No. xx (October 2024), xx - xx

P-ISSN 2252-7907 | E-ISSN 2716-0335

DOI : 10.15642/elqist.202x.xx.x.xxx-xxx

Inovasi dan Tantangan Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi Produk, dan Literasi Keuangan

Abdur Rohman Karim Amanulloh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: abdurrohmankarim093@gmail.com

Diva Nadila

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: divandilaa@gmail.com

Hizib Quba Akbar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: hizibqubaakbar76@gmail.com

Fauzan Syahrul Maulana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: fauzans1365@gmail.com

Abstract: This study aims to explore product innovation and challenges in the development of sharia pension funds in Indonesia in relation to the application of halal principles and contemporary financial needs. The method used in this study is a descriptive qualitative approach that focuses on three Sharia Financial Institution Pension Funds (DPLK), namely DPLK Bank Muamalat, DPLK Mandiri Inhealth, and DPLK BRI Life. Data collection was conducted through semi-structured interviews, analysis of documents from relevant institutions, reports issued by the Financial Services Authority, and fatwas from the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and thematic conclusion drawing. The findings show that innovation in Sharia pension funds is still adaptive in nature, the digitization process has not achieved maximum results, and Sharia financial literacy in the community is relatively low. In addition, limitations in halal investment instruments and technical regulations are major obstacles in developing Sharia pension funds. This study emphasizes the importance of cooperation between regulators, pension fund managers, and the

public to build a sustainable Islamic pension fund ecosystem that is in line with maqashid al-shariah.

Keywords: Sharia pension funds, Product innovation, Financial literacy, Regulation, Maqashid sharia

Pendahuluan

Kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang semakin meningkat karena perubahan demografi dan ketidakpastian dalam perekonomian global (Creswell, 2014). Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan sistem pensiun yang mengikuti prinsip syariah menjadi makin relevan (KNEKS, 2023). Dana pensiun berbasis syariah diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip larangan riba, gharar, dan maysir seperti yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI (DSN-MUI, 2023).

Meskipun sektor keuangan syariah di negara kita mengalami perkembangan yang pesat, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pensiun syariah masih tergolong minim jika dibandingkan dengan program pensiun konvensional (OJK, 2024). Salah satu alasan utama mengapa situasi ini terjadi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, yang tercatat hanya mencapai 9,14% menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2022). Di samping itu, terbatasnya inovasi dalam produk serta penggunaan teknologi digital juga menjadi hambatan dalam menarik minat terhadap program pensiun syariah (Hassan & Rahman, 2023).

Berdasarkan situasi tersebut, terdapat perbedaan antara potensi besar dana pensiun syariah dan pelaksanaan pengembangannya di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengupas dana pensiun syariah dari perspektif normatif dan regulasi, sementara kajian empiris mengenai inovasi produk dan tantangan implementasi di tingkat lembaga masih minim (Iseputri et al., 2023).

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan produk dana pensiun syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek inovasi produk, dukungan regulasi, dan tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengidentifikasi jenis inovasi produk dana pensiun syariah yang telah diimplementasikan, menganalisis masalah regulasi dan pelaksanaan yang dihadapi oleh lembaga pengelola dana pensiun syariah, serta menilai peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap dana pensiun syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode studi kasus terhadap tiga Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, yakni DPLK Bank Muamalat, DPLK Mandiri Inhealth, dan DPLK BRI Life. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara sengaja dengan memperhatikan pendaftaran lembaga di Otoritas Jasa Keuangan serta merepresentasikan praktik dana pensiun syariah di Indonesia (OJK, 2024).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola DPLK Syariah untuk mengeksplorasi informasi mengenai inovasi produk, digitalisasi layanan, dan tantangan dalam regulasi. Data sekunder diambil dari laporan resmi OJK, publikasi KNEKS, fatwa DSN-MUI, serta artikel jurnal yang berkaitan.

Analisis informasi dilakukan melalui tiga langkah, yakni pengurangan data dengan memilih informasi yang relevan, presentasi data dalam bentuk tema-tema sentral, serta pembuatan kesimpulan secara induktif (Miles & Huberman, 2014). Keabsahan data dipertahankan dengan triangulasi sumber melalui perbandingan hasil wawancara dan dokumen resmi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil studi mengindikasikan bahwa proporsi aset dari dana pensiun syariah di Indonesia masih kurang dari 5% dari keseluruhan aset dana pensiun yang ada di negara ini, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang minim dalam sistem pensiun nasional (OJK, 2024). Dalam hal inovasi, produk dana pensiun syariah umumnya masih merupakan modifikasi dari produk konvensional dengan penyesuaian akad sesuai syariah, sehingga belum mencapai nilai inovatif yang maksimal (Isepputri et al., 2023).

Dari aspek digitalisasi, DPLK Bank Muamalat telah meluncurkan aplikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk memantau saldo dan melakukan simulasi manfaat pensiun, tetapi fungsinya masih terbatas pada informasi. Di sisi lain, DPLK Mandiri Inhealth dan BRI Life Syariah masih bergantung pada sistem digital yang lebih konvensional, sehingga inovasi berbasis syariah belum sepenuhnya dapat dijalankan (Hassan & Rahman, 2023).

Hambatan lain yang penting adalah kurangnya alat investasi halal yang memiliki jangka panjang dan risiko yang rendah. Portofolio investasi dana pensiun syariah masih didominasi oleh sukuk pemerintah dan simpanan syariah, yang mengurangi kemungkinan imbal hasil maksimal bagi peserta (Sukmana, 2024).

a. Implikasi kebijakan

1. OJK perlu mempercepat penyusunan peraturan teknis investasi dana pensiun syariah, termasuk perluasan daftar instrumen halal.
2. DSN-MUI perlu menstandarkan fatwa akad dana pensiun syariah serta memperkuat sistem pengawasan berbasis digital.
3. Lembaga pengelola dana pensiun harus mengembangkan ekosistem digital berbasis syariah yang mencakup fitur edukasi dan simulasi manfaat.
4. Pemerintah dan KNEKS disarankan untuk memperkuat literasi pensiun halal melalui kurikulum pendidikan dan kampanye nasional.

b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan terbatas pada tiga lembaga DPLK Syariah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan pendekatan kuantitatif dan melibatkan lebih banyak lembaga untuk mengukur efektivitas inovasi digital dan dampak regulasi.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana pensiun berbasis syariah di Indonesia mempunyai peluang pengembangan yang signifikan, tetapi masih menghadapi hambatan seperti kurangnya inovasi produk, layanan yang belum digital, regulasi teknis yang belum memadai, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara para pembuat kebijakan, lembaga pengelola, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperluas pilihan investasi yang halal, memperkuat regulasi teknis, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dana pensiun syariah. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk menerapkan pendekatan kuantitatif dengan cakupan lembaga yang lebih luas agar dapat menilai pengaruh inovasi terhadap kinerja dana pensiun syariah secara lebih menyeluruh.

Referensi

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.

DSN-MUI. (2023). Fatwa No. 172/DSN-MUI/X/2023 tentang pedoman akad dana pensiun syariah.

Hassan, M., & Rahman, F. (2023). Digital transformation in Islamic pension funds: An Indonesian perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 77–93.

Isepputri, R., Rahmadani, F., & Azhar, M. (2023). Strategi pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 22–34.

KNEKS. (2023). *Laporan keuangan syariah nasional 2023–2027*. Jakarta: KNEKS.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.

OJK. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan*. Jakarta: OJK.

OJK. (2024). *Laporan perkembangan dana pensiun syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.

Sukmana, R. (2024). Islamic financial literacy and pension awareness in Southeast Asia. *Asian Journal of Islamic Finance*, 9(2), 121–138.